



BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional, maka dipandang perlu mengadakan perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- b. bahwa perubahan Lampiran dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana sudah empat kali dirubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Penyangga Tumbuhan, Pengawas Bibit Ternak, Medik Neteriner, Paramedik Neteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional untuk Pustakawan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Adminisrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera;
21. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
22. Surat Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1245.K/MEM/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Migas.
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 150/Kep/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya.

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 9 Maret 2007

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal 9 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TANGGAL : 9 MARET 2007

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BADUNG.

JABATAN FUNGSIONAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.

No	Nama Jabatan Fungsional	Nama Peraturan		Instansi Pembina
		Menteri	Presiden	
1	2	3	4	5
1	Dokter	No. 139/KEP/M.PAN/11/2003	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
2	Perawat	No. 94/KEP/M.PAN/11/2001	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
3	Bidan	No. 93/KEP/M.PAN/11/2001	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
4	Perawat Gigi	No. 22/KEP/M.PAN/4/2001	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
5	Asisten Apoteker	No. 07/KEP/M.PAN/12/1999	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
6	Sanitarian	No. 19/KEP/M.PAN/11/2000	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
7	Dokter Gigi	No. 141/KEP/M.PAN/11/2003	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
8	Apoteker	No. 140/KEP/M.PAN/11/2003	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
9	Radiografer	No. 133/KEP/M.PAN/12/2002	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
10	Perekam Medis	No. 135/KEP/M.PAN/12/2002	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
11	Administrator Kesehatan	No. 42/KEP/M.PAN/12/2000	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
12	Nutrisionis	No. 23/KEP/M.PAN/4/2001	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
13	Pranata Laboratorium Kesehatan	No. 07/KEP/M.PAN/2/2000	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
14	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	No. 58/KEP/M.PAN/8/2	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
15	Epidemolog Kesehatan	No. 17/KEP/M.PAN/11/2000	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
16	Entomolog Kesehatan	No. 18/KEP/M.PAN/11/2000	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
17	Teknisi Elektromedis	No. 41/KEP/M.PAN/4/2000	No. 47 Th. 2006	Dinas Kesehatan
18	Analisis Kepegawaian		No. 39 Th. 2006	Dinas Kesehatan

19	Penyuluh Kehutanan	No. 130/KEP/M.PAN/12/2002	No. 26 Th. 2006	Dinas Perhutanan dan Perkebunan
20	Penyuluh Pertanian	No. 19/KEP/MKWAS.PAN/5/1999	No. 26 Th. 2006	Dinas Perhutanan dan Perkebunan
21	Penyuluh Pertanian	No. 411/KPTS/OT.210/2/2000	No. 26 Th. 2006	Dinas Peternakan
22	Medik Veteriner	No. 59/KEP/MK.WASBANGPAN/9/1999	No. 26 Th. 2006	Dinas Peternakan
23	Paramedik Veteriner	No. 60/KEP/MK.WASBANGPAN/9/1999	No. 26 Th. 2006	Dinas Peternakan
24	Pengawas Bibit Ternak	No. 60/KEP/MK.WASBANGPAN/9/1999	No. 26 Th. 2006	Dinas Peternakan
25	Pengawas Mutu Pakan	No. 31/KEP/M.PAN/3/2004	No. 26 Th. 2006	Dinas Peternakan
26	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	No. 129/KEP/M.PAN/12/2003 JO. KEP/04/M.PAN/1/2005	No. 64 Th. 2006	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27	Penera	No. 128/KEP/M.PAN/12/2002 JO. KEP/03/M.PAN/1/2005	No. 64 Th. 2006	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28	Penguji Mutu Barang	No. 131/KEP/M.PAN/12/2002 JO. KEP/05/M.PAN/1/2005	No. 64 Th. 2006	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	Pekerja Sosial	No./KEP/03/M.PAN/1/2004	No. 31 Th. 1993	Dinas Sosial
30	Penyuluh Keluarga Berencana	No. KEP.120/M.PAN/2002 Kepber.No.280/HK.007/B.2/2004 No. 131/HK.010/12/2004	No. 57 Th. 2006	Kantor Keluarga Berencana
31	Penyuluh Pertanian	No. 37/MENPAN/1995	No. 26 Th. 2006	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
32	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	No.36/ KEP/MK/WASPAN/9/1999 KEP.BER.No.1041/Kpts/OT.210/1999	No. 26 Th. 2006	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
33	Asiparis dan Pustakawan	No. 132/Kep/M.PAN/12/2002	No. 40 Th. 2006	Kantor Perpustakaan Umum
34	Penguji Kendaraan Bermotor	No.150/ Kep/M/PAN /11/1999 KEP.BER.No.KM. 48 Tahun 2004		Dinas Perhubungan
35	Pranata Komputer	No.66/KEP/M.PAN/7/2003	No. 33 Th. 2006	Kantor Informasi dan Telematika

36	Pengawas Perikanan	No.35/KEP/M.PAN/5/2001	No. 26 Th. 2006	Dinas Perikanan dan Kelautan
37	Pengendalian Hama Penyakit Ikan	No.36/KEP/M.PAN/5/2001	No. 26 Th. 2006	Dinas Perikanan dan Kelautan
38	Pengawas Benih Ikan	No.37/KEP/M.PAN/5/2001	No. 26 Th. 2006	Dinas Perikanan dan Kelautan
39	Penyuluh Pertanian	No.19/KEP/MK.WASPAN/9/1999	No. 26 Th. 2006	Dinas Perikanan dan Kelautan
40	Guru	MENPANN0. 84/1993	No. 58 Th. 1996	Dinas Pendidikan
41	Penilik	No.15/KOP/M.PAN/3/2002	No. 58 Th. 1996	Dinas Pendidikan
42	Pengawas Sekolah	No.91/KEP/M.PAN/10/2001	No. 58 Th. 1996	Dinas Pendidikan
43	Pamong Belajar	No.25/KEP/MK/WASPAN/6/1996	No. 58 Th. 1996	Dinas Pendidikan
44	Perantara Hubungan Industrial	No.40/KEP/M.PAN/12/2000	No. 36 Th. 2006	Dinas Tenaga Kerja
45	Pengawas Ketenagakerjaan	No.35/KEP/M.PAN/3/2003	No. 44 Th. 2006	Dinas Tenaga Kerja
46	Sandiman	No.20/KEP/MENDAGRI 2000 No.34/ KEP/MENDAGRI 2001 No.134/KEP.M.PAN/11/2003	No. 59 Th. 2001	Bagian Umum
47	Jabatan Fungsional Inspektur Migas	No.1245 K/70/MEM/2002		Kantor Pertambangan dan Energi

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG